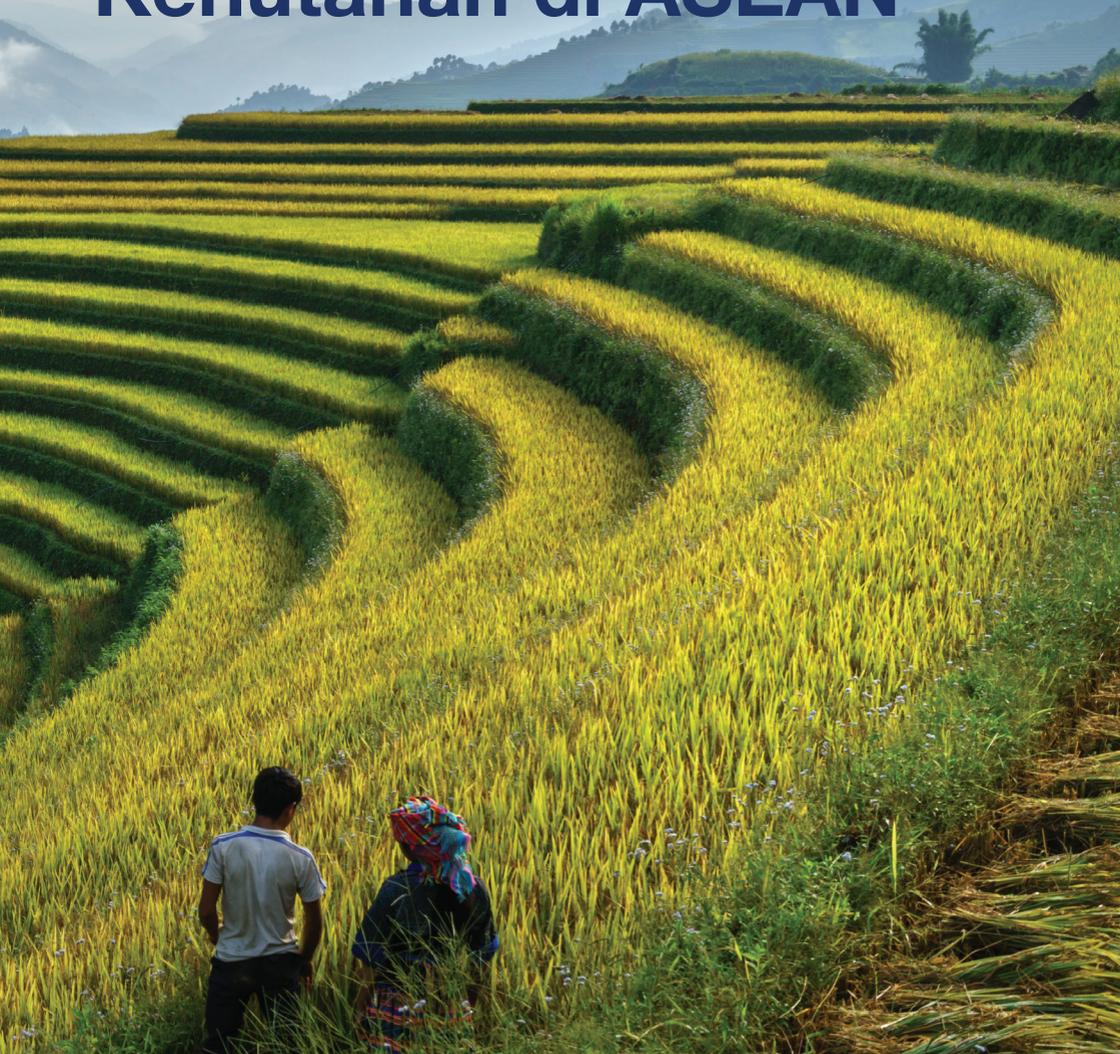


Pedoman untuk

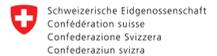
Investasi Bertanggung Jawab di Bidang Pangan, Pertanian, dan Kehutanan di ASEAN







Pedoman untuk Investasi Bertanggung Jawab di Bidang Pangan, Pertanian, dan Kehutanan di ASEAN dikembangkan melalui proses multi pemangku kepentingan yang eksklusif dengan dukungan Sekretariat ASEAN, Grow Asia, Lembaga Pembangunan dan Kerja Sama Swiss (SDC), World Bank Trust Fund, dan Institusi Pembangunan Berkelanjutan Internasional (IISD).



Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.aseanraiguilines.org





Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pangan yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi, kenaikan pendapatan, dan urbanisasi di wilayah ASEAN, maka bidang pertanian akan terus menarik investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di negara-negara berkembang.

Investasi di Bidang Pertanian yang Bertanggung Jawab di Wilayah ASEAN

Pedoman untuk Investasi Bertanggung Jawab di Bidang Pangan, Pertanian, dan Kehutanan di ASEAN¹ (PPK) dibuat dengan dan berdasarkan Prinsip Investasi yang Bertanggung Jawab pada Sistem Pertanian dan Pangan yang dimiliki Komite Ketahanan Pangan Dunia (CFS-RAI). Pedoman tersebut ditujukan untuk pemerintah-pemerintah Negara Anggota ASEAN (AMS) dan disesuaikan dengan tantangan khusus yang mereka hadapi, serta merancang peran kunci dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, termasuk pelaku swasta berskala besar. Pedoman ini juga disusun berdasarkan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan merujuk padanya apabila diperlukan. Pedoman ini bersifat sukarela.

Tujuan utama Pedoman ini adalah untuk mendukung investasi di bidang pangan, pertanian, dan kehutanan di wilayah ASEAN yang berkontribusi bagi pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan gizi, keamanan makanan, dan kesetaraan manfaat, serta penggunaan sumberdaya alam berkelanjutan secara regional. Tujuan lainnya meliputi:

Membuat ketentuan yang nyaman guna menarik investasi bertanggung jawab di bidang Pangan, Pertanian, dan Kehutanan (PPK) melalui kerangka kebijakan dan aturan yang jelas serta pendekatan yang lebih koheren di seluruh wilayah ASEAN.

Mencapai keseimbangan antar kepentingan - termasuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan lain, yang berdasarkan kontrak mensyaratkan investor untuk memenuhi kewajiban mereka serta membuat perangkat dan peralatan demi kerja sama yang lebih jauh, sehingga mendukung tujuan utama dari Pedoman ini.

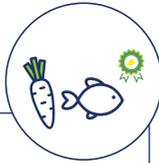
Menyusun kerangka untuk memandu AMS, investor besar dan kecil, dan para pelaku lain dalam pembangunan investasi pertanian yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta rantai nilai di wilayah tersebut.

Menciptakan sejumlah kepentingan, yang memberikan rujukan dalam pengambilan keputusan, perilaku, dan tindakan selama jangka waktu menengah sampai jangka waktu panjang.

¹ Pada bulan September 2017, Forum Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF) sepakat untuk mengembangkan Pedoman untuk Investasi Bertanggung Jawab di Bidang Pangan, Pertanian, dan Kehutanan di ASEAN, Pertanian, dan Kehutanan ("Pedoman") saat pertemuan tahunan mereka yang ke-39. Pedoman tersebut khusus untuk sektor swasta. Pendanaan proyek berasal dari Lembaga Pembangunan dan Kerja Sama Swiss (SDC), World Bank Trust Fund, dan tenaga ahli yang dibawa secara khusus dari Institut Pembangunan Berkelanjutan Internasional (IISD) dari Genewa.

Apa saja yang ingin dicapai pedoman ini untuk pemerintah

Pedoman 1



Berkontribusi terhadap ketahanan pangan, keamanan makanan, dan gizi yang lebih baik, dengan cara:

- Menghargai hak untuk bebas dari kelaparan.
- Berupaya mencapai SDG 2 (mengakhiri kelaparan) dan sasaran-sasaran ASEAN terkait.
- Mengamankan pasokan berkelanjutan atas pangan yang terjangkau, aman, dan bergizi.
- Menghargai hak petani atas keragaman.

Untuk mencapai semua itu, pertimbangkan:

- Penyediaan lingkungan yang memungkinkan bagi investasi yang bertanggung jawab.
- Pengembangan rencana sektor pangan, pertanian, dan kehutanan (PPK) serta strategi ketahanan pangan.
- Dukungan terhadap program fortifikasi pangan dan kemitraan pemerintah-swasta (PPPs).
- Pengembangan pembiayaan pedesaan untuk meningkatkan akses terhadap pasar dan infrastruktur.
- Pemantauan dampak investasi terhadap ketahanan pangan.

Pedoman 2



Berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang berkelanjutan, setara, dan inklusif, dengan cara:

- Mendorong pertumbuhan yang bersifat adil yang mengurangi kemiskinan dan mendukung kesetaraan gender.
- Menciptakan pekerjaan dan penghidupan yang layak, aman dan berkelanjutan.
- Mendukung peningkatan kualitas dan pemenuhan standar untuk petani kecil.
- Memastikan komitmen kontrak yang berimbang dan berlaku antara investor dan negara pemilik lahan.
- Menyyaratkan kontrak yang lebih adil dan transparan antara pembeli dan produsen.
- Menghargai dan mendukung penghidupan hutan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai semua itu, pertimbangkan:

- Mengadopsi komitmen kontraktual investor untuk pengembangan bisnis lokal dan pelatihan.
- Eksplorasi berbagai alternatif untuk konsesi lahan berskala besar, seperti pertanian kontrak yang inklusif.
- Pengenalan strategi melibatkan masyarakat dalam kontrak investor-negara.
- Pengembangan kontrak dan kesadaran yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban pada kontrak.
- Peningkatan keikutsertaan petani kecil dan konsumen pada kebijakan investasi dan pengembalian keputusan.
- Pengembangan strategi inklusi bagi wanita dan kaum marjinal pada proyek-proyek investasi.
- Penyusunan program pengembangan keuangan mikro, kredit masyarakat pedesaan, keterhubungan pasar, dan usaha kecil.

Pedoman 3



Berkontribusi terhadap kesetaraan, keterlibatan, dan pendayagunaan wanita, pemuda, masyarakat adat, dan kaum marjinal, dengan cara:

- Mendukung kesetaraan akses ke peluang dan perlindungan hak asasi manusia.
- Mengakui kontribusi dan keutamaan wanita dan pemuda bagi sektor PPK
- Mengetahui peran sentral PPK dalam mendukung model bisnis inklusif untuk memastikan akses ke ketenagakerjaan dan kewirausahaan.
- Meningkatkan akses ke lahan, sumber daya, jasa, pendidikan, pasar dan informasi.
- Mengatasi peningkatan kerentanan terhadap dampak bencana alam dan perubahan iklim.
- Memastikan partisipasi penting dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan kemitraan.

Untuk mencapai semua itu, pertimbangkan:

- Peningkatan akses ke pendidikan, keadilan hukum dan hak berorganisasi bagi wanita.
- Penyediaan layanan yang lebih luas dan sensitif terhadap gender bagi petani kecil dan pengusaha kecil dan menengah (SME).
- Pemahaman tentang peran kunci wanita di dalam keluarga dan ketahanan pangan masyarakat.
- Fasilitasi kemitraan dan jaringan diantara organisasi masyarakat sipil, kelompok petani, kaum adat dan koperasi wanita.
- Kepastian akses bagi pemuda terhadap sumber daya dan peluang pasar.

Pedoman 4



Hargai kepemilikan tanah, perikanan, dan kehutanan, serta akses ke air, dengan cara:

- Menghargai pemegang hak kepemilikan tanah yang sah serta hak kaum adat dan masyarakat setempat
- Menilai dampak sosial dari aktivitas investasi terhadap semua pemegang hak kepemilikan tanah yang sah.
- Bertindak menghindari pengalihan dan pemukiman kembali bagi pemegang hak kepemilikan tanah yang sah.

Untuk mencapai semua itu, pertimbangkan:

- Perkuat perundang-undangan dan kebijakan tentang tanah serta sistem hak kepemilikan tanah yang transparan dan adil.
- Fasilitasi sertifikasi tanah (land title), baik secara kolektif, komunal, maupun individual.
- Peningkatan kesadaran hak kepemilikan tanah dan kemampuan negosiasi masyarakat.
- Pembangunan kesadaran atas dan pemenuhan terhadap VGGT.²
- Minimalisasi pemukiman kembali dan mitigasi yang tidak dapat dihindari terkait dampak negatif.

²VGGT adalah Pedoman Sukarela tentang Tata Kelola Kepemilikan Tanah, Perikanan, dan Kehutanan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional.



Pedoman 5

Berkontribusi terhadap konservasi dan manajemen berkelanjutan atas sumber daya alam, khususnya kehutanan, dengan cara:

- Mencegah, meminimalkan, dan memperbaiki dampak negatif sumber daya alam.
- Mendukung praktik manajemen hutan yang berkelanjutan.
- Mengetahui nilai ekonomi, sosial, budaya dan ekologi dari hutan.
- Menyeimbangkan ekonomi, konservasi, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan kaum adat.
- Mendukung pencarian sumber dan sertifikasi lingkungan dan sosial untuk produk-produk PPK.
- Meningkatkan efisiensi produksi dan penggunaan produktif atas sampah dan produk olahannya.
- Mendorong konsumsi berkelanjutan.
- Memastikan perencanaan, pengelolaan dan tata kelola sumber daya alam yang kuat dan partisipatif.

Untuk mencapai semua itu, pertimbangkan:

- Dukungan terhadap sistem pengelolaan sumber daya alam yang komprehensif.
- Pengelolaan air secara adil dan efisien.
- Kepastian akses air yang sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia.
- Pengembangan rencana hutan nasional yang secara eksplisit menyelesaikan masalah-masalah investasi.
- Dukungan terhadap proses desentralisasi pengelolaan hutan dan proses devolusi.
- Penyediaan koordinasi antar kementerian, penyusunan standari, perencanaan, dan pemantauan.
- Dukungan terhadap penghidupan alternatif di kawasan berhutan.



Pedoman 6

Dukung teknologi dan praktik yang baik dan berkelanjutan untuk sistem PPK sumber daya yang efisien, produktif dan aman, dengan cara:

- Berinvestasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia untuk penelitian dan pengembangan (Litbang), disertai pembinaan etos 'lab to field'.
- Menerapkan kebijakan untuk pengembangan, komersialisasi dan distribusi teknologi.
- Mendukung kolaborasi dan koordinasi diantara Negara Anggota ASEAN untuk Litbang.
- Mengembangkan investasi sektor swasta pada inovasi melalui kemitraan pemerintah-swasta (PPP) yang strategis.
- Mendukung model bisnis inklusif untuk mendorong transfer teknologi.
- Memperkuat forum-forum pemangku kepentingan multi untuk pertukaran informasi, inovasi dan berbagi pengetahuan.
- Mengakui dan menghargai pengetahuan tradisional dan hak kekayaan intelektual.

Untuk mencapai semua itu, pertimbangkan:

- Pengembangan keterampilan pada komersialisasi teknologi dan kemitraan pemerintah-swasta (PPP).
- Pembuatan sistem inovasi yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta dan petani kecil.
- Pendanaan pengadaan awal teknologi untuk petani kecil dan pengusaha kecil dan menengah.
- Pengembangan proses penyaringan dan pemilihan investasi yang memastikan penggunaan teknologi berkelanjutan.
- Penyediaan dukungan teknis khusus tanaman dan perusahaan kepada petani kecil.
- Keterhubungan lembaga penelitian pertanian dengan LSM teknologi.
- Penciptaan lingkungan yang memungkinkan untuk teknologi pertanian dan PPP transfer pengetahuan.
- Penyediaan kerangka hukum dan kebijakan yang efektif untuk hak kekayaan intelektual.



Pedoman 7

Tingkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, bencana alam dan guncangan lainnya, disertai kontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan cara:

- Mengenal potensi PPK untuk berkontribusi terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Mengembangkan, menguji dan meningkatkan cara-cara beradaptasi terhadap iklim.
- Memperkenalkan produk-produk berisiko bagi petani kecil serta pengusaha kecil dan menengah atas perubahan iklim dan bencana.
- Menghargai pengetahuan dan praktik masyarakat asli dan tradisional terkait adaptasi iklim.
- Mengatasi semakin tingginya kerentanan wanita, pemuda dan kaum marjinal terhadap perubahan iklim.

Untuk mencapai semua itu, pertimbangkan:

- Peningkatan dana untuk penelitian terkait perubahan iklim, layanan penyuluhan, dan teknologi.
- Pengembangan kerangka hukum dan kebijakan untuk produk asuransi iklim yang inovatif.
- Identifikasi langkah-langkah untuk mengambil tindakan iklim tertentu, dalam konteks proyek investasi.



Pedoman 8

Hargai aturan hukum dan gunakan struktur, proses dan mekanisme pengaduan tata kelola yang inklusif dan transparan, dengan cara:

- Terikat pada perundang-undangan nasional, baik yang tertulis maupun tidak.
- Menghindari praktik korupsi dan penyuapan.
- Berbagi informasi yang relevan dengan investasi secara proaktif dan inklusif.
- Mendukung akses ke mediasi, pengaduan dan mekanisme penyelesaian perselisihan.
- Mengatasi masalah tanah warisan.
- Berkonsultasi dengan penuh makna dan responsif untuk memastikan partisipasi aktif, gratis, efektif dan terinformasi.
- Mempromosikan lingkungan hukum dan kebijakan yang transparan, koheren, dan konsisten.

Untuk mencapai semua itu, pertimbangkan:

- Penyusunan pedoman untuk pengungkapan secara berkala atas informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat diakses.
- Penguatan akses bagi masyarakat lokal dan kaum adat ke layanan hukum pro bono dan bantuan hukum.
- Pengawasan terhadap konsultasi, negosiasi, dan penanganan keluhan antara investor dan masyarakat.
- Kepastian akses ke peradilan yang efektif dan terjangkau serta upaya hukum lainnya.
- Kemungkinan adanya partisipasi penting dari pemangku kepentingan pada pengambilan kebijakan investasi.
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pemerintahan.
- Dukungan terhadap kesetaraan akses ke informasi, layanan, insentif dan sumber daya.
- Kepastian adanya pemberlakuan hukum dan perundang-undangan yang tidak diskriminatif.



Pedoman 9

Lakukan penilaian dan penanganan dampak investasi PPK yang bertanggung jawab dan dukung akuntabilitas dengan cara:

- Menyyaratkan penilaian dampak yang independen dan transparan.
- Menentukan data dan indikator utama untuk pemantauan dan penilaian dampak dengan cara yang inklusif.
- Menyaring investasi untuk menyesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
- Mengidentifikasi cara-cara mitigasi untuk mengatasi dampak negatif.
- Memastikan bahwa semua penilaian tersedia secara publik dan dapat diakses.
- Menilai semua perubahan secara teratur dan mengkomunikasikan hasil ke pemangku kepentingan.
- Melakukan pemulihan yang efektif dan/atau pemberian kompensasi atas dampak negatif.

Untuk mencapai semua itu, pertimbangkan:

- Penguatan penerapan peraturan penilaian dampak.
- Pengintegrasian hasil penilaian dampak kedalam rencana pengelolaan.
- Pemantauan dan peninjauan ulang dampak yang dilakukan secara teratur, disertai memasukkan semua pemangku kepentingan terkait kedalam proses ini.
- Kepastian bahwa semua hasil kegiatan pemantauan dapat dengan mudah diakses oleh publik.
- Pemberlakuan proses penyaringan yang efektif dan efisien untuk investor berskala besar.



Pedoman 10

Perkuat pendekatan regional pada investasi yang bertanggung jawab di PPK wilayah ASEAN dengan cara:

- Menyelaraskan standar, peraturan dan pendekatan disertai penerapan fleksibilitas.
- Mendukung 'lomba menuju puncak' melalui insentif untuk praktik bisnis yang bertanggung jawab.
- Bekerja sama dalam membangun kapasitas dan jaringan untuk berbagi informasi dan meningkatkan standar regional.

Untuk mencapai semua itu, pertimbangkan:

- Pengembangan pendekatan berbagi ke promosi dan fasilitasi investasi PPK.
- Dukungan terhadap bantuan antar wilayah, bertukar pengalaman dan pembangunan kapasitas.
- Penerapan praktik dan standar internasional yang baik di tingkat regional.
- Dukungan terhadap kerjasama bilateral antara negara tuan rumah dan negara investor untuk memonitor investasi secara bersama-sama.



Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan Lain

Terdapat berbagai peran dan tanggung jawab penting bagi semua pemangku kepentingan Pangan, Pertanian, di Kehutanan (PPK), khususnya pengusaha pertanian dan investor berskala besar, tetapi juga petani kecil, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, komunitas, masyarakat sipil, dan lembaga keuangan.

Memastikan bahwa investasi mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal, dengan cara:

- Menilai dampak dari sebuah proyek terhadap ketahanan pangan lokal dan berupaya mengurangi efek buruk yang terjadi.
- Membahas ketahanan pangan pada saat pengumpulan dengan masyarakat.
- Menyediakan pekerjaan yang layak, stabil, dan bergaji baik, serta membayar dengan harga yang pantas.

Berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, setara, dan berkelanjutan, dengan cara:

- Membantu bisnis lokal agar dapat memenuhi standar kualitas dan kinerja yang lebih baik.
- Membina kewirausahaan lokal.
- Mengurangi dampak negatif dari penetapan harga dan pemasaran bagi petani kecil.

Mendukung pengikutsertaan wanita dalam pengambilan keputusan, ketenagakerjaan yang penting, dan pendayagunaan ekonomi, dengan cara:

- Mempromosikan partisipasi wanita secara aktif.
- Membangun penyaluran bakat yang beragam di semua tingkat.
- Menerapkan kebijakan dan pelatihan anti diskriminasi dan tindak kekerasan.

Membantu pemuda dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk berintegrasi kedalam sector PPK, termasuk dengan cara:

- Menawarkan pelatihan, lowangan magang, pembinaan, beasiswa, dan pinjaman.
- Menargetkan pemuda untuk berpartisipasi dalam program-program outgrower.
- Mendukung kewirausahaan pemuda.
- Bermitra dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) yang mendukung pendayagunaan pemuda.

Menghargai kepemilikan tanah, perikanan, dan kehutanan yang dimiliki masyarakat lokal:

- Mengenali dan meneliti konteks dan sistem kepemilikan tanah lokal.
- Menegosiasikan secara langsung dengan para pemegang hak kepemilikan tanah yang sah.
- Mencegah perpindahan dan pemukiman kembali.
- Memastikan bahwa pemukiman kembali telah memenuhi praktik terbaik internasional, apabila pemukiman kembali tersebut terbukti tidak dapat dihindari.
- Memastikan adanya perizinan yang aktif, bebas, efektif, dan berarti dari masyarakat mengenai keputusan yang melibatkan berbagai sumber daya ini.
- Meninjau ulang prosedur tanah 'yang sudah disiapkan' untuk memastikan terpenuhinya standar internasional.

Menghargai akses masyarakat lokal ke air, dengan cara:

- Memperhatikan potensi dampak terhadap akses dan kualitas air pada konsultasi inklusif.
- Menggunakan penilaian dampak lingkungan dan sosial dan menggunakan rencana pengelolaan.
- Memastikan adanya dampak positif yang berkelanjutan dari akses air masyarakat.

Mendukung penciptaan dan penyeteraan teknologi dan praktik berkelanjutan, dengan cara:

- Mengetahui penghalang bagi perbaikan teknologi dan membantu petani kecil dan para pengusaha kecil dan menengah dalam mengatasinya.
- Memastikan semua proses pengambilan keputusan teknologi yang inklusif.
- Berinvestasi pada program dukungan teknis paska jual dan program penatagunaan produk yang kuat.
- Melatih produsen lokal untuk mempertunjukkan dan menyebarkan teknologi.
- Menyediakan layanan-layanan yang mendukung penggunaan teknologi, seperti pembiayaan dan dukungan teknologi.
- Berinvestasi pada kemampuan Litbang lokal.

Memainkan peran dalam meningkatkan ketahanan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim, bencana alam, dan kejadian mengejutkan lainnya:

- Mendukung penelitian, termasuk dengan berpartisipasi di dalam kemitraan pemerintah-swasta (PPP).
- Menggunakan jaringan bisnis untuk membantu meningkatkan praktik iklim terbaik.
- Mendukung penggunaan praktik dan adaptasi mitigasi terhadap perubahan iklim untuk digunakan oleh masyarakat.
- Menghindari praktik bisnis yang memperburuk perubahan iklim.

Mendukung keterlibatan dan akuntabilitas masyarakat yang penting, dengan cara:

- Memahami konteks, demografi, dan dinamika kekuatan masyarakat lokal.
- Membangun komunikasi, transparansi, dan kepercayaan yang efektif dengan masyarakat.

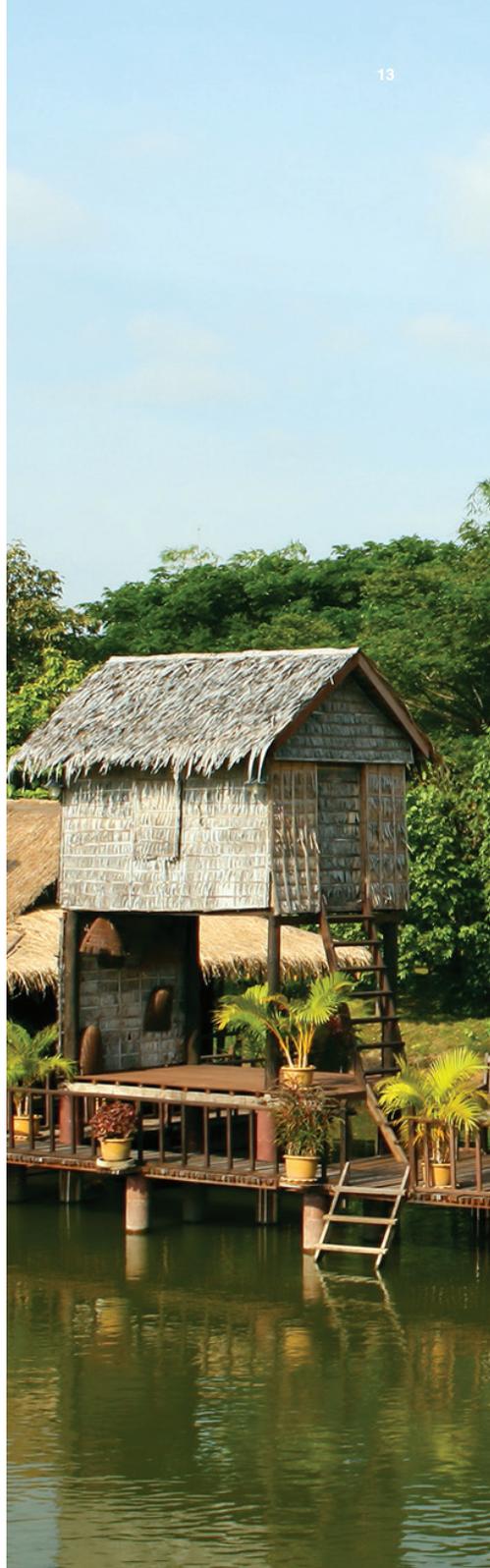
- Secara aktif mengungkapkan semua informasi yang relevan dengan cara yang dapat dipahami.
- Melatih staf agar dapat berinteraksi dengan anggota masyarakat secara sensitif dan saling menghargai.
- Membuat mekanisme penyelesaian keluhan yang konsultatif, dapat dipublikasikan, dan transparan.

Melakukan penilaian, penyelesaian, dan pemantauan dampak proyek investasi, dengan cara:

- Menilai dampak sosial dan lingkungan serta menggunakan semua pertimbangan ini kedalam desain proyek.
- Memantau secara teratur kinerja sosial dan lingkungan.
- Menggunakan sistem dan teknologi informasi manajemen dalam memantau dan merekam dampak tersebut.
- Memantau dan mengurangi kecelakaan, cedera, dan dampak kesehatan pekerja.
- Menggunakan badan-badan sertifikasi independen untuk memeriksa kesesuaian dengan panduan praktik terbaik.

Berkontribusi dalam memperkuat pendekatan regional pada investasi yang bertanggung jawab di PPK dalam wilayah ASEAN, dengan cara:

- Bergabung dengan organisasi PPK secara regional maupun global.
- Menilai dan mengurangi eksternalitas negatif lintas batas yang muncul dari proyek.





Petani kecil serta pengusaha kecil dan pengusaha menengah dapat membantu mendukung pelaksanaan Pedoman, dengan cara:

- Berpartisipasi dalam peluang pertukaran informasi, teknologi, dan pengetahuan.
- Terlibat dalam program pengembangan dan pelatihan bisnis.
- Memastikan adanya koperasi produsen dan jaringan pengusaha kecil dan menengah yang kuat dan inklusif.
- Menerapkan pedoman bagi investor besar untuk mencapai standar tertinggi.



Masyarakat dapat membantu mendukung pelaksanaan Pedoman, dengan cara:

- Menggunakan badan yang representatif dan inklusif untuk berhubungan dengan investor dan mendukung hak-hak.
- Membuat kesepakatan dengan investor tentang bagaimana hubungan tersebut akan dijalankan.
- Mengadakan forum-forum masyarakat untuk mengambil keputusan dan berbagi informasi.
- Berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat.
- Berpartisipasi secara aktif dalam konsultasi dan pemantauan berbasis masyarakat.
- Berbagi pengetahuan dan praktik tradisional dari masyarakat asli mengenai adaptasi terhadap perubahan iklim.



Kelompok masyarakat sipil dapat membantu mendukung pelaksanaan Pedoman, dengan cara:

- Merefleksikan dan mengimplementasikan Pedoman kedalam alur kerja dan program mereka.
- Membantu negara dalam menerapkan aspek-aspek Pedoman ini.
- Bermitra dengan pemangku kepentingan lain untuk mendukung implementasi Pedoman ini 'di lapangan'.

- Menggunakan Pedoman dalam kegiatan kampanye, pendidikan, dan advokasi.
- Mendukung masyarakat dengan program pelatihan dan pengembangan kapasitas.



Para pelaku sektor swasta dapat membantu mendukung pelaksanaan Pedoman, dengan cara:

- Mengembangkan asuransi iklim dan produk keuangan lainnya untuk petani kecil.
- Menggunakan teknologi keuangan inovatif untuk meningkatkan akses ke keuangan.
- Mendanai investasi yang mengadopsi prinsip-prinsip Pedoman ini.



Negara tuan rumah yang berasal dari investor Negara Anggota ASEAN dapat membantu mendukung Pedoman, dengan cara:

- Menghargai hak negara investor atas pangan ketika berinvestasi untuk mengeksport pangan kembali ke negara tuan rumah.
- Membangun kemitraan untuk mempromosikan investasi berkelanjutan.
- Memberikan insentif yang tepat dan bertanggung jawab untuk mendorong investasi berkelanjutan.
- Berkoordinasi dengan negara investor untuk melaksanakan proyek investasi.
- Mengatur kegiatan bisnis investor domestik atas investasi ke luar negeri.



